

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.tempo.co
Media Cetak	

Soal Interpelasi Formula E, Wagub Riza: Hak Dewan, Pemprov DKI Tak Mencampuri

Reporter Moh. Khory Alfarizi
Editor Clara Maria Tjandra Dewi H.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi rencana [interpelasi Formula E](#) oleh anggota DPRD DKI. Menurut dia, pada prinsipnya semua itu hak yang melekat pada para anggota dewan dan Pemerintah Provinsi DKI tidak memcampurinya.

"Itu hak daripada dewan. Kami tidak mencampuri apa lagi mengintervensi tentu harapan kami Pemprov tentu tidak memutus hubungan baik yang selama ini antara dengan DPRD," kata [Wagub DKI](#) di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 27 Juli 2022.

Menjelang akhir jabatannya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Riza menginginkan hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI semakin harmonis. "Justru hubungannya harus semakin kita tingkatkan," kata Riza Patria, yang juga Ketua DPD Gerindra Jakarta.

PDIP Tetap Interpelasi Formula E Meski Acaranya Dihadiri Jokowi dan Puan

Hingga saat ini Fraksi PDIP DPRD DKI tetap menggulirkan wacana interpelasi Formula E, meski ajang balapan mobil listrik itu telah digelar. Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani juga menghadiri acara itu.

Bagi anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP [Gembong Warsono](#), selesainya ajang balapan Formula E bukan berarti wacana interpelasi juga ikut finish. Gembong kembali menggaungkan hak meminta keterangan eksekutif atau interpelasi soal Formula E. "Interpelasi bukan berhenti karena Formula E sudah terlaksana," kata Gembong, 7 Juni 2022.

Ia berdalih, digulirkannya kembali wacana interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta. "Pemprov jangan hanya mengejar sukses dalam perhelatan Formula E, namun mengabaikan soal transparansi pengelolaan APBD-nya," ucapnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu mendorong pimpinan DPRD DKI untuk menjadwalkan rapat di Badan Musyawarah. Agendanya, melanjutkan paripurna yang sempat tertunda karena tidak kuorum pada 28 September 2021.

Selain Gembong, anggota DPRD DKI yang juga dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga juga ingin kembali diadakan interpelasi. "Kami sepakat, justru ini kesempatan kami untuk mempertanyakan (transparansi). Jadwalnya nanti diatur sama kesekretariatan," ucapnya.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI itu mengatakan sikap politik PDIP untuk mengajukan [interpelasi Formula E](#) tidak berubah. "Kami tetap komitmen untuk teliti terhadap Formula E itu, janji dan kesepakatan kami seperti itu," ucapnya.